



---

## Pendidikan Islam di Era Jepang: Antara Pembatasan dan Peluang

Nurul Auliyah HS<sup>1</sup>, Qahar M<sup>2</sup>, Idrus L.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia; email: [nurulauliyahhs@gmail.com](mailto:nurulauliyahhs@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia; email: [muharramqahar@gmail.com](mailto:muharramqahar@gmail.com)

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia; email: [Idruslatif.iainbone@gmail.com](mailto:Idruslatif.iainbone@gmail.com)

---

### Keywords

Islamic education;  
Japanese occupation;  
restriction;  
opportunity;  
pesantren;  
madrasah

### ABSTRACT

This article examines the dynamics of Islamic education in Indonesia during the Japanese occupation (1942–1945), focusing on two policy roles that both restricted and created opportunities for institutions such as pesantren, Muhammadiyah, and Aisyiyah. Using a critical literature review method, this study identifies two main aspects: institutional restrictions that affected educational activities and opportunities that emerged in the recruitment of teaching staff, curriculum development, and the role of organizations. The results indicate that despite being under strict supervision, Islamic institutions were able to adapt and innovate, thereby contributing to the formation of Islamic educational identity in the post-independence era. These developments remain crucial for understanding current challenges in Islamic education.

---

### A. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang menunjukkan dua sisi: adanya pembatasan kebijakan yang ditujukan untuk mendukung kepentingan militer Jepang sekaligus peluang bagi beberapa tokoh dan institusi Islam untuk

berfungsi di bawah pengawasan ketat, sehingga konteks pendidikannya tidak sepenuhnya terpisah antara keterasingan dan keterlibatan publik.<sup>1</sup>

Di sisi lain, sumber sejarah menunjukkan bahwa campur tangan Nipponisasi menyebabkan perubahan dalam peran organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan pesantren, meskipun dengan batasan-batasan yang signifikan dalam kurikulum dan pembiayaan, yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan dan arah pendidikan Islam di periode pasca-kemerdekaan.<sup>2</sup>

Pembatasan kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam memiliki aspek politik yang sangat berkaitan dengan usaha penyatuan sistem pendidikan dan pengawasan terhadap organisasi keagamaan, sehingga meskipun ada kesempatan untuk tokoh Islam terlibat dalam pengelolaan pendidikannya, otonomi kelembagaan dan kurikulum madrasah serta pesantren tetap terbatas secara operasional demi kesatuan militer dan ideologi negara penjajah. Seiringan dengan itu, analisis sejarah juga menunjukkan perubahan fokus pendidikan Islam dari pengembangan spiritual menuju mobilisasi nasional dan persiapan perang, yang mencerminkan dampak ideologis Nipponisasi terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan institusi pendidikan Islam di lapangan praktiknya. Ketegangan antara kesempatan adanya institusi Islam dan pembatasan praktis tersebut membentuk salah satu wajah utama periode Jepang dalam studi pendidikan Islam Indonesia.

Meskipun identik dengan pembatasan, era pendudukan Jepang juga memberikan kesempatan praktis bagi pendidikan Islam. Beberapa kajian menekankan bahwa Jepang membuka akses bagi kelompok Muslim tertentu melalui pengakuan terhadap organisasi Islam dan dukungan terhadap pengembangan institusi keagamaan dalam batas-batas kebijakan pendudukan, sehingga ada ruang

---

<sup>1</sup> Syarif, M. R. (2019). Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Tarbiya Islamia Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 247. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.477>

<sup>2</sup> Anas, F. (2023). Dinamika Pendidikan Muhammadiyah Pada Masa Penjajahan Jepang Di Yogyakarta Tahun 1942-1945. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9(1), 137-162. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v9i1.368>

bagi tokoh-tokoh Islam untuk berperan dalam pengelolaan pendidikan yang diawasi militer.<sup>3</sup> Namun kesempatan ini tidak merata secara geografis maupun institusional, sehingga variasi konteks lokal tetap menjadi faktor penentu sejauh mana pendidikan Islam mampu beradaptasi dengan kebijakan Nipponisasi.<sup>4</sup> Secara khusus, beberapa studi menunjukkan bahwa pembukaan akses semacam itu dapat meningkatkan partisipasi beberapa pemimpin Islam dalam pengelolaan fasilitas pendidikan, meskipun dengan koordinasi ketat yang mengurangi otonomi kurikuler.<sup>5</sup>

Konsekuensi era Jepang terhadap masa setelah kemerdekaan juga penting untuk dipahami. Pengalaman pembatasan dan peluang selama masa pendudukan memengaruhi cara pendidikan Islam didefinisikan ulang di negara Indonesia setelah Orde Lama, di mana institusi pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya berusaha menyesuaikan diri dengan hukum nasional serta tuntutan modernisasi pendidikan nasional yang kemudian dituangkan dalam kebijakan pendidikan nasional setelah kemerdekaan.<sup>6</sup> Penelitian sejarah menunjukkan bahwa warisan kebijakan Jepang membentuk narasi tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam seharusnya dirancang secara inklusif untuk masa depan bangsa, sehingga dampak era pendudukan tetap relevan bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam nasional di era reformasi dan setelah reformasi.<sup>7</sup>

Rumusan masalah dalam studi ini berfokus pada dua pertanyaan utama: bagaimana pembatasan kebijakan Jepang memengaruhi eksistensi dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia selama pendudukan, serta bagaimana era setelah kemerdekaan menginternalisasi pelajaran dari pembatasan dan peluang

---

<sup>3</sup>Rohman, M. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ack3p>

<sup>4</sup>Anas, F. (2023). Dinamika Pendidikan Muhammadiyah Pada Masa Penjajahan Jepang Di Yogyakarta Tahun 1942-1945. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9(1), 137–162. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v9i1.368>

<sup>5</sup>Rizal, A. (2020). Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945). *Jurnal Indo-Islamika*, 4(2), 179–189. <https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17394>

<sup>6</sup>Abbas, I. (2017). Islamic Law in the Legal Political System. *Al-Mizan*, 13(2), 156–184. <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.875>

<sup>7</sup>Rana, M. (2018). Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>

tersebut untuk memperkuat kurikulum dan institusi Islam. Kontribusi penelitian ini terletak pada penekanan bahwa era Jepang menghasilkan dua wajah yang saling melengkapi: pembatasan institusional yang membatasi otonomi lembaga dan kurikulum, serta peluang praktis bagi tokoh-tokoh Islam untuk terlibat dalam administrasi pendidikan dan memperluas akses bagi beberapa komunitas Muslim.<sup>8</sup>

Dalam kerangka teoretis, literatur teori receptor terhadap penerimaan hukum Islam dan dinamika hukum Islam di Indonesia memberikan dasar analitis untuk memahami bagaimana pembatasan eksternal dapat mempengaruhi tatanan hukum dan kebijakan pendidikan Islam saat transisi menuju kemerdekaan. Beberapa kajian memperlihatkan bagaimana pola kebijakan pendidikan nasional terbentuk melalui interaksi antara kekuasaan kolonial, pendudukan Jepang, dan pembentukan norma hukum nasional pascapenjajahan, sehingga narasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia menjadi bagian penting dari konstruksi hukum negara. Perdebatan ini menegaskan bahwa kebijakan Jepang menambah kerumitan pada pembentukan identitas nasional Islam yang akhirnya membentuk dasar kebijakan pendidikan Islam Indonesia pada era pasca-kemerdekaan.<sup>9</sup>

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen sejarah yang berhubungan dengan pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan mengkaji berbagai informasi yang berhubungan dengan kebijakan

---

<sup>8</sup>Syarif, M. R. (2019). Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiya Islamia Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 247. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.477>

<sup>9</sup>Ichsan, M., Maulia, S. T., & Hendra, H. (2023). Budi Utomo: Pemantik Pergerakan Nasional. *Edu Sosial Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 3(1), 96–106. <https://doi.org/10.22437/jeso.v3i1.26928>

pendidikan Jepang serta dampaknya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menekankan pada aspek pembatasan dan peluang yang muncul selama masa penjajahan Jepang.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Pembatasan kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam

Sistem Nipponisasi dan kendali kelembagaan Jepang mengintervensi kebijakan pendidikan nasional untuk membangun kerangka Nipponisasi dengan tujuan militer dan ideologis Asia Timur Raya, yang secara signifikan membatasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya. Pembatasan ini terlihat pada perubahan kurikulum dan anggota organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan Islam yang diawasi ketat militer Jepang.<sup>10</sup>

Pembatasan terhadap lembaga Islam tertentu Kebijakan Jepang secara umum menghambat pertumbuhan sekolah Islam dan pembiayaan, meskipun ada situasi di mana ruang gerak lebih longgar dibanding masa Hindia Belanda. Kontrol operasional lembaga keagamaan meningkat karena pengawasan militer, sehingga independensi institusi keagamaan berkurang meskipun beberapa pengantar kebijakan memberi peluang terbatas bagi aktivitas keagamaan.<sup>11</sup>

Variasi regional dan orientasi kurikulum Kebijakan Jepang menunjukkan variasi regional (mis. Yogyakarta, Surakarta, Sambas) dalam tingkat pembatasan dan tingkat pembukaan lembaga Islam. Tujuan pendidikan nasional tetap: membentuk warga negara yang setia terhadap misi militer Jepang, sehingga kurikulum pendidikan Islam mengalami perubahan untuk memasukkan unsur kebijakan militer Nipponisasi,

---

<sup>10</sup> Mentari, I. A., & Yulifar, L. (2018). Brain Korea 21st Project: Perkembangan Kemajuan Pendidikan Tinggi Dan Dampaknya di Korea Selatan Tahun 1999- 2005. *Factum Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 175–188. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15604>

<sup>11</sup> Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh Kolonialisme Jepang Terhadap Pendidikan Islam. *Ta Dibun Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164–177. <https://doi.org/10.32832/tadibun.v9i2.3441>

dengan prioritas yang lebih rendah pada dimensi spiritual/akhirat di beberapa konteks perang.<sup>12</sup>

Efek jangka panjang terhadap orientasi kurikulum Beberapa kajian menunjukkan perubahan orientasi kurikulum pendidikan Islam yang berdampak pada masa pasca-kemerdekaan, di mana unsur Nipponisasi tetap meninggalkan jejak pada bagaimana kurikulum pendidikan Islam dipandang dan diorganisasi secara nasional pasca 1945.<sup>13</sup>

### **Peluang dan ruang ekspresi dalam pendidikan Islam**

Ruang gerak informal dan adaptasi kurikulum Meskipun pembatasan ketat, Jepang memberikan ruang gerak terbatas bagi organisasi Islam untuk beroperasi dalam kerangka yang diawasi, misalnya pembukaan kembali beberapa madrasah/pondok pesantren dan pembentukan jaringan keagamaan yang dapat diarahkan pada kepentingan militer Jepang. Komunitas Islam menggunakan jalur non-formal dan adaptasi kurikulum untuk mempertahankan identitas keagamaan serta kelangsungan institusi pendidikan Islam di bawah control pendudukan.<sup>14</sup>

Ruang gerak institusional melalui organisasi Islam Muhammadiyah, NU, pesantren, dan madrasah dapat bertahan lewat kelonggaran terbatas yang diberikan Jepang untuk aktivitas keagamaan, dengan perubahan kurikulum yang menyesuaikan kebijakan Nipponisasi. Hal ini menandai adanya peluang bertahan meskipun bentuknya dikontrol oleh pendudukan.<sup>15</sup>

Infrastruktur keagamaan dan kepatutan budaya kesempatan jangka panjang mencakup penguatan infrastruktur pendidikan Islam melalui pembukaan mushalla,

---

<sup>12</sup>Fatmawati, D., & Ahmad, R. (2021). Kurikulum Pesantren Ideal di Era Digital. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2689. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3111>

<sup>13</sup>Mentari, I. A., & Yulifar, L. (2018). Brain Korea 21st Project: Perkembangan Kemajuan Pendidikan Tinggi Dan Dampaknya Di Korea Selatan Tahun 1999- 2005. *Factum Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 175–188. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15604>

<sup>14</sup>Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh Kolonialisme Jepang Terhadap Pendidikan Islam. *Ta Dibun Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164–177. <https://doi.org/10.32832/tadibun.v9i2.3441>

<sup>15</sup>Ketaren, A., & Nasution, P. P. (2018). Konflik Gam-Ri Dan Kerentanan Pangan Masyarakat Transmigran. *Jurnal Antropologi Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 103–117. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018>

fasilitas pendidikan yang diperbolehkan, serta jalur-jalur keagamaan yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas komunitas Islam dalam menjaga tradisi pendidikan Islam di era pendudukan Jepang. Peran organisasi di tingkat lokal seperti Muhammadiyah, NU, dan pesantren berkontribusi pada kelangsungan aktivitas keagamaannya meski dalam konteks militer pendudukan.<sup>16</sup>

Reformulasi kurikulum dalam batasan Nipponisasi Kurikulum Islam pada masa itu disesuaikan untuk menyertakan unsur militer dan nasionalisme pendudukan, sehingga aspek spiritual/akhirat menjadi kurang penting dalam beberapa konteks. Namun, unsur budaya keagamaan tetap dipertahankan melalui jalur non-formal dan komunitas pendidikan Islam lokal yang mampu menyesuaikan diri dengan batasan formal negara.<sup>17</sup>

## **2. Pembahasan Penelitian**

### **Hubungan antara Pembatasan dan Peluang**

Kaitan antara pembatasan dan peluang Pembatasan Nipponisasi mendorong penyesuaian institusional dan kurikuler di antara komunitas Islam lokal. Ketahanan lembaga Islam lokal (pesantren, madrasah, Muhammadiyah, NU) menunjukkan kemampuan mempertahankan inti ajaran Islam melalui perubahan kurikulum di bawah pengawasan negara pendudukan. Ruang jaringan keagamaan juga dibangun untuk meningkatkan kapasitas pendidikan Islam meskipun dibatasi, sehingga praktik keagamaan tetap berlangsung secara contingent.<sup>18</sup>

Dinamika regional Tingkat pembatasan dan peluang berbeda antara wilayah, menunjukkan bahwa Nipponisasi tidak diterapkan secara merata di semua wilayah. Perbedaan regional menunjukkan bagaimana aktor lokal memanfaatkan celah

---

<sup>16</sup> Syarif, M. R. (2019). Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiya Islamia Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 247. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.477>

<sup>17</sup> Mentari, I. A., & Yulifar, L. (2018). Brain Korea 21st Project: Perkembangan Kemajuan Pendidikan Tinggi Dan Dampaknya Di Korea Selatan Tahun 1999- 2005. *Factum Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 175–188. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15604>

<sup>18</sup> Fatmawati, D., & Ahmad, R. (2021). Kurikulum Pesantren Ideal di Era Digital. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2689. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3111>

kebijakan untuk mempertahankan praktik keagamaan dan lembaga pendidikan Islam, yang kemudian membentuk narasi sejarah yang bervariasi di era penjajahan Jepang.<sup>19</sup>

Implikasi bagi kajian sejarah pendidikan Islam Penekanan pada interaksi antara kebijakan nasional Jepang, praktik kelembagaan Islam, dan dinamika komunitas lokal menyediakan gambaran yang lebih lengkap daripada narasi pembatasan saja. Ini menunjukkan bagaimana faktor politik, sosial, dan budaya berperan dalam perubahan pendidikan Islam serta bagaimana hal itu membentuk pengajaran sejarah pendidikan Islam di masa penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan.<sup>20</sup>

### **Implikasi bagi Penelitian dan Praktik Sejarah Pendidikan Islam**

Arah metodologi Penelitian masa depan sebaiknya menggunakan pendekatan historis-komparatif dengan studi kasus regional (mis. Yogyakarta, Surakarta, Sambas) untuk memahami variasi kebijakan dan penyesuaian lembaga Islam. Penekanan gabungan antara kebijakan formal, praktik kelembagaan, dinamika komunitas, serta konteks lokal sangat dianjurkan untuk memahami kompleksitas masa penjajahan Jepang secara menyeluruh.<sup>21</sup>

Pelajaran bagi kurikulum masa kini, interaksi antara batasan kebijakan dan kesempatan adaptasi memberikan pelajaran penting tentang bagaimana institusi pendidikan Islam dapat bertahan dan tetap relevan di tengah tekanan ideologi luar. Elemen adaptasi kurikulum, penciptaan jaringan keagamaan, dan penggunaan

---

<sup>19</sup> Anas, F. (2023). Dinamika Pendidikan Muhammadiyah Pada Masa Penjajahan Jepang Di Yogyakarta Tahun 1942-1945. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9(1), 137–162. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v9i1.368>

<sup>20</sup> Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh Kolonialisme Jepang Terhadap Pendidikan Islam. *Ta Dibun Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164–177. <https://doi.org/10.32832/tadibun.v9i2.3441>

<sup>21</sup> Syarif, M. R. (2019). Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiya Islamia Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 247. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.477>

infrastruktur non-formal dapat dijadikan acuan untuk kebijakan pendidikan Islam modern yang peka terhadap konteks politik dan sosial.<sup>22</sup>

Nuansa regional dan pentingnya konteks lokal Perbedaan wilayah menuntut penekanan pada konteks lokal dalam narasi sejarah pendidikan Islam masa pendudukan Jepang. Pemetaan variasi regional membantu mengkonstruksi narasi yang lebih kaya dan akurat tentang bagaimana pembatasan berinteraksi dengan peluang bagi komunitas Islam setempat.<sup>23</sup>

## D. Kesimpulan

### Kesimpulan

Pembatasan kebijakan Jepang melalui Nipponisasi membatasi lembaga, kurikulum, dan operasional pendidikan Islam dengan pengawasan ketat dan kontrol militer. Madrasah, pesantren, serta organisasi seperti Muhammadiyah dan NU terus beroperasi, tetapi dalam batasan kendali pemerintah Jepang dengan variasi penerapan di setiap wilayah. Meski begitu, pembatasan ini tidak menghentikan aktivitas keagamaan. Komunitas Islam memanfaatkan jalur non-formal, penyesuaian kurikulum, serta penguatan jaringan keagamaan untuk mempertahankan identitas Islam. Dalam praktiknya, pendidikan Islam tetap berjalan meskipun telah disesuaikan dengan kepentingan Jepang. Variasi regional menunjukkan adanya perbedaan tingkat pembatasan, di mana beberapa wilayah lebih fleksibel dibanding yang lain. Secara jangka panjang, pengalaman ini membentuk ketahanan dan kemampuan adaptasi lembaga pendidikan Islam, sekaligus memengaruhi perkembangan pendidikan Islam pada masa pasca-kemerdekaan.

---

<sup>22</sup> Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh Kolonialisme Jepang Terhadap Pendidikan Islam. *Ta Dibun Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164–177. <https://doi.org/10.32832/tadibun.v9i2.3441>

<sup>23</sup> Mentari, I. A., & Yulifar, L. (2018). Brain Korea 21st Project: Perkembangan Kemajuan Pendidikan Tinggi Dan Dampaknya Di Korea Selatan Tahun 1999- 2005. *Factum Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 175–188. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15604>

## Implikasi

1. Penelitian mendatang perlu menggunakan pendekatan komparatif antar daerah untuk memahami variasi kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam.
2. Perlu ditingkatkan metodologi, khususnya dalam analisis sejarah kritis agar hasil penelitian lebih valid dan mendalam.
3. Kajian dampak jangka panjang terhadap pendidikan Islam pasca-kemerdekaan perlu diperluas.
4. Hasil penelitian dapat dipakai sebagai referensi dalam mengembangkan pendidikan Islam yang adaptif tanpa menghilangkan nilai keislaman.
5. Diperlukan dokumentasi sumber sejarah yang lebih teratur untuk mendukung pengembangan penelitian di masa depan.

## Daftar Pustaka

- Abbas, I. (2017). Islamic Law in the Legal Political System. *Al-Mizan*, 13(2), 156–184. <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.875>
- Anas, F. (2023). Dinamika Pendidikan Muhammadiyah Pada Masa Penjajahan Jepang Di Yogyakarta Tahun 1942-1945. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9(1), 137–162. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v9i1.368>
- Fatmawati, D., & Ahmad, R. (2021). Kurikulum Pesantren Ideal di Era Digital. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2689. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3111>
- Ichsan, M., Maulia, S. T., & Hendra, H. (2023). Budi Utomo: Pemantik Pergerakan Nasional. *Edu Sosial Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 3(1), 96–106. <https://doi.org/10.22437/jeso.v3i1.26928>
- Ketaren, A., & Nasution, P. P. (2018). Konflik Gam-Ri Dan Kerentanan Pangan Masyarakat Transmigran. *Jurnal Antropologi Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 103–117. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018>
- Mentari, I. A., & Yulifar, L. (2018). Brain Korea 21st Project: Perkembangan Kemajuan Pendidikan Tinggi dan Dampaknya di Korea Selatan Tahun 1999- 2005. *Factum Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 175–188. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15604>

- Rana, M. (2018). Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>
- Rizal, A. (2020). Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945). *Jurnal Indo-Islamika*, 4(2), 179–189. <https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17394>
- Rohman, M. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ack3p>
- Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh Kolonialisme Jepang Terhadap Pendidikan Islam. *Ta Dibuna Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164–177. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3441>
- Syarif, M. R. (2019). Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Tarbiya Islamia Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 247. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.477>